

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar belakang**

Luas daratan Indonesia adalah 1.904.569 kilometer persegi dan mengandung sumber daya alam (SDA) yang melimpah serta sumber daya manusia (SDM) dalam hal usia produktif. Dengan kondisi seperti itu, dapat dikatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang berpotensi dapat menyerap banyak calon tenaga kerja. Meskipun sumber daya alam melimpah dan tenaga kerja (SDM) yang besar, tetapi Indonesia masih belum bisa dikatakan berkembang secepat seperti yang diharapkan. Malah jumlah tenaga kerja yang terus meningkat juga dapat menimbulkan masalah baru yaitu pengangguran (D.C.Tyas, 2010).

Masalah baru tersebut seperti rendahnya kualitas yang dimiliki calon tenaga kerja, ini disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan, minimnya lapangan pekerjaan dan tidak adanya kemampuan (keahlian) dari para pencari kerja yang menjadi penyebab bertambahnya pengangguran di negara ini. Pengangguran sering diartikan sebagai angkatan kerja yang belum bekerja atau tidak bekerja secara optimal (Prasetyo dan Rakhmadian, 2019).

Pengangguran menjadi masalah serius yang dihadapi dalam pembangunan sumber daya manusia yang tengah dilakukan saat ini. Kondisi tingginya tingkat pengangguran memberikan dampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi kemiskinan, kasus kriminalitas dan masalah masalah sosial politik yang justru semakin meningkat ditambah lagi dengan jumlah angkatan kerja yang semakin lama

semakin meningkat, arus migrasi yang terus mengalir, serta ketersediaan lapangan pekerjaan yang kurang sehingga membuat permasalahan tenaga kerja menjadi sangat besar dan kompleks.

Disisi lain, angkatan kerja yang masih menganggur enggan untuk mulai berwirausaha atau membuka lapangan kerja sendiri karena hal ini didukung dengan teori dari (Wennekers, 2018) yang mengatakan pada negara berkembang lahirnya usaha baru cenderung rendah sehingga berdampak pada rendahnya pendapatan per kapita dan meningkatnya angka pengangguran.

Jika mengacu pada Undang Undang No 13 tahun 2003 tentang pengertian Ketenagakerjaan, secara reguler tugas dan fungsi Kementerian Ketenagakerjaan agar bisa membantu masyarakat atau pencari kerja dalam memperoleh pekerjaan dengan cara memberikan informasi mengenai lowongan kerja, Informasi pelatihan. Pelatihan dan pengembangan SDM yang tepat guna, dapat memberikan dampak yang positif kepada calon pekerja. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah penggunaan terintegritas dari pelatihan dan pengembangan, pengembangan karir, dan pengembangan organisasi untuk meningkatkan efektivitas individu (Daniel Adi Setya, 2022). Pelatihan merupakan suatu tahapan untuk membina dan mempersiapkan calon pekerja dengan menambah keahlian, kemampuan, pengetahuan dan perilakunya (Kasmir 2019).

Berbicara masalah pengangguran bukan hanya menjadi masalah bagi pemerintah pusat saja tetapi juga bagi pemerintah daerah juga mengalami masalah yang krusial terhadap penanggulangan dan penanganan angka pengangguran. Seperti

halnya yang terjadi pada pemerintah Kota Tanjungpinang bahwa angka pengangguran merupakan masalah yang harus cepat ditanggulangi demi mencapai kesejahteraan rakyat. Fenomena yang terjadi di Kota Tanjungpinang yaitu para pencari kerja yang terdata di Dinas Tenaga Kerja dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Isu terkait pengangguran menjadi salah satu isu yang dibahas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungpinang tahun 2018-2023 dimana salah satu point isu strategisnya yaitu membahas belum optimalnya kualitas Sumber Daya Manusia. Disisi lain Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengakui pengangguran terbuka di wilayah Kepulauan Riau masih tinggi bahkan angkanya sudah melampaui pada tingkat nasional yaitu dari data per bulan Februari 2021 mencapai 10,12 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan TPT nasional yang ada dikisaran 6,26 persen. Provinsi Kepulauan Riau berada di urutan nomor dua penyumbang jumlah pengangguran tertinggi se- Indonesia setelah Jawa Barat yang dihitung saat ini per Agustus 2022 sebanyak 8,23 persen atau sekitar 8,42 juta orang.

Adanya kesulitan lain yang membuat pengangguran di Tanjungpinang bertambah karena calon tenaga kerja yang sudah membuat kartu kuning atau yang disebut AK-1 mereka tidak melaporkan bahwasannya mereka sudah mendapatkan pekerjaan kepada pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tanjungpinang dalam angka 2022, terhitung jumlah penduduk Kota Tanjungpinang pada tahun 2021 mencapai sekitar 233.367 jiwa dan penduduk usia produktifnya mencapai sekitar 104.730 jiwa. Sayangnya jumlah penduduk usia produktif sebanyak itu tidak

didukung oleh tersedianya lapangan kerja baru serta tidak ada keinginan diri sendiri untuk menciptakan lapangan kerja (berwirausaha).

Sebab jika jumlah penduduk usia produktif setiap tahun semakin meningkat di suatu daerah, maka jumlah orang pencari kerja juga akan semakin banyak dan sejalan dengan itu, angka tenaga kerja juga akan bertambah.

Adapun isu-isu lainnya yang dibahas dalam Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMK Tanjungpinang 2018-2023 yaitu:

1. Pengangguran semakin meningkat dan ditambah peluang kerja yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja
2. Jumlah pencari kerja semakin meningkat sementara jumlah penempatan kerja rendah
3. pendamping infrastruktur untuk Sumber Daya Manusia masih kurang dikarenakan dan belum optimalnya pelaporan perusahaan tentang tenaga kerja.
4. Tenaga kerja yang mengikuti pelatihan kewirausahaan dan pelatihan berbasis kompetensi (sertifikasi) masih terbatas

Keberadaan tenaga kerja ini akan menimbulkan masalah apabila peningkatan jumlah tenaga kerja yang cukup besar tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja untuk menyerapnya maka akan dapat menimbulkan tingginya tingkat pengangguran pada gilirannya dapat menimbulkan kerawanan sosial dan nantinya dapat menimbulkan masalah-masalah baru yang ada ditengah masyarakat.

Sejak awal pandemi covid-19 hingga tahun 2021 angka pengangguran di Kota Tanjungpinang ini terjadi penambahan yang bisa dibilang cukup signifikan. Ini berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) jumlahnya dari semula hanya sekitar 5.000 orang, kemudian bertambah menjadi sekitar 9.000 orang.

Selain itu masalah yang perlu diperhatikan pemerintah kota Tanjungpinang adalah terbatasnya lapangan kerja, sehingga persaingan untuk mencari pekerjaan masa sekarang ini sangatlah sulit, terbukti dengan jumlah lapangan pekerjaan yang disediakan sedikit jika dibandingkan dengan jumlah pencari kerja yang banyak sehingga memberi dampak pada kenaikan angka pengangguran, terutama bagi mereka yang keterampilannya yang masih terbatas

**Tabel 1.1 Data Ketenagakerjaan dalam bentuk persen Di Kota Tanjungpinang**

No	Ketenagakerjaan	Tahun		
		2019	2020	2021
1.	Angkatan Kerja	97,14%	102,53%	101,87%
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,31%	9,30%	6,31%
3.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	62,46%	62,56%	60,56%
4.	Bekerja Terhadap Angkatan Kerja	94,36%	90,70%	93,69%

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMK Tanjungpinang, 2023

Hal ini juga selaras dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Tanjungpinang nomor 2 tahun 2009 tentang organisasi dan Tenaga Kerja Dinas Daerah Kota

Tanjungpinang sebagai instansi yang diberi kewenangan untuk membantu peningkatan kualitas tenaga kerja dan produktivitas, bagi calon tenaga kerja, tenaga kerja (berbagai sektor usaha) serta membantu memaksimalkan kualitas hubungan konsituen antara industrial, pemerintah, pekerja dan pengusaha

Untuk mengurangi angka pengangguran di Kota Tanjungpinang, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM menjalankan Implementasi Strategi dalam bentuk program pelatihan yang saat ini memang sangat dibutuhkan dalam dunia kerja seperti program pelatihan bidang pengelasan (*welder*), menjahit, pembuatan kue tradisional, mengemudi mobil, dan *barbershop*. Tujuan penyelenggaraan pelatihan ini untuk mengasah *skill*, membentuk keterampilan serta kemampuan seseorang agar dapat menghasilkan pekerjaan yang maksimal (Wahjono et al. 2019). Penyelenggaraan pelatihan ini merupakan salah satu program pendukung upaya Dinas Tenaga Kerja dalam melakukan pemberdayaan bagi masyarakat untuk menekan tingkat pengangguran di Kota Tanjungpinang.

Memang tidak bisa dipungkiri lagi saat ini banyak pencari kerja khususnya di Kota Tanjungpinang yang belum memiliki keahlian sebelum masuk ke dunia kerja. Sedangkan sekarang ini banyak perusahaan yang sangat membutuhkan tenaga kerja handal dan juga memiliki suatu keahlian atau *skill*. sebab dengan memiliki keahlian sudah tentu akan berpengaruh bagi produktifitas dan juga kinerja bagi perusahaan itu sendiri

Dengan begitu agar pelatihan berfungsi secara efektif, maka pelatihan harus menyeimbangkan antara teori dan praktik, dengan pelatihan yang terencana dengan

baik dapat mewujudkan tujuan dari para pekerja dalam mengikuti pelatihan. Dengan cara ini, tenaga kerja masa depan siap menyadari potensi yang sudah mereka miliki dan memahami kompleksitas untuk melangkah lebih jauh.

Dengan adanya isu yang muncul terkait ketenagakerjaan di Kota Tanjungpinang, adapun tugas dan fungsi pokok dari Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMK Tanjungpinang adalah Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan pengoordinasian serta pembinaan teknis penempatan dan pelatihan kerja, Penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penempatan dan pelatihan kerja, Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan penempatan dan pelatihan kerja yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan mereformasi pelatihan kerja.

Pelaksanaan pelatihan kerja ini bertujuan untuk menyediakan tenaga kerja yang lebih terampil, dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan fleksibel sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Setelah calon tenaga kerja sudah mengikuti pelatihan dan memiliki bekal keterampilan ataupun keahlian, diharapkan mereka mampu menciptakan lapangan kerja dan bersaing dalam mencari pekerjaan. Serta dengan terselenggaranya program ini dapat memberikan kontribusi mengurangi angka pengangguran di Kota Tanjungpinang.

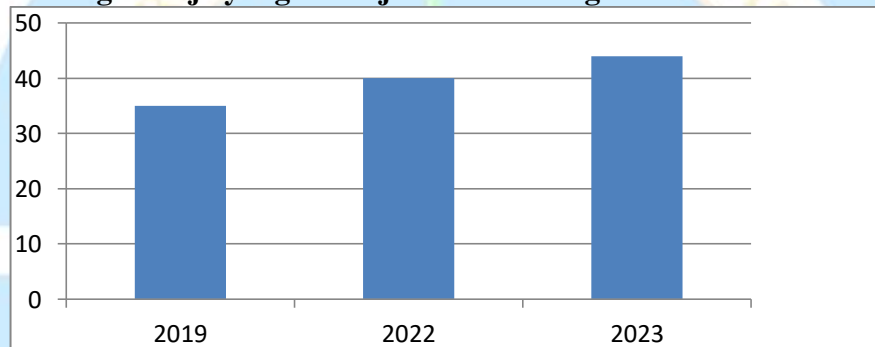
Adapun jumlah calon tenaga kerja yang mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMK Tanjungpinang.

**Tabel 1.2 Data Jumlah Tenaga Kerja Yang Mengikuti Program Pelatihan**

Program / Kegiatan	Tahun		
	2019	2022	2023
Tenaga Kerja yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi	60 orang	105 orang	30 orang
Tenaga Kerja yang mengikuti pelatihan berbasis kewirausahaan	20 orang	30 orang	30 orang

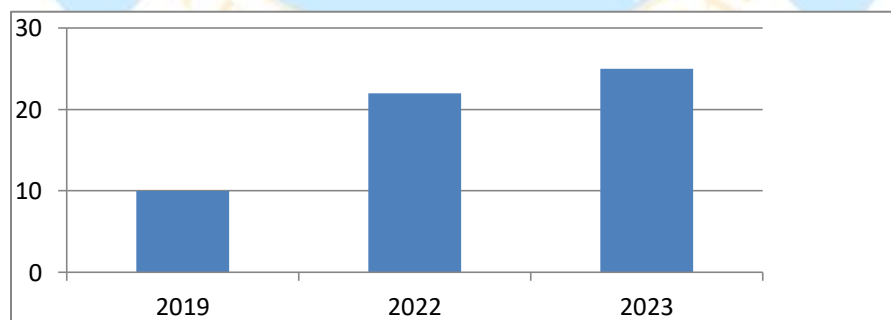
*Sumber: Olahan Data Peneliti, 2023*

**Gambar 1. 1**  
**Data Tenaga Kerja yang Bekerja Setelah Mengikuti Pelatihan Kompetensi**



*Sumber: Olahan Data Peneliti, 2023*

**Gambar 1. 2**  
**Data Tenaga Kerja yang Bekerja Setelah Mengikuti Pelatihan Kewirausahaan**



*Sumber: Olahan Data Peneliti, 2023*



Berdasarkan data pada gambar 1.1. dan gambar 1.2. diatas, jumlah tenaga kerja yang bekerja setelah mengikuti pelatihan ini baik pelatihan berbasis kompetensi maupun wirausaha mengalami kenaikan dari tahun 2019, 2022 dan 2023. Maka, persoalan tentang ketenagakerjaan terutama pengangguran melalui program pelatihan dapat ditangani secara efektif apabila bertumpu pada Rencana Strategis (Renstra), yang telah dibebankan kepada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMK Tanjungpinang.

Dengan bertumpunya pada perencanaan strategis tersebut maka calon tenaga kerja yang ada di Kota Tanjungpinang dapat berdaya guna serta sudah memiliki keahlian sehingga nantinya calon calon tenaga kerja ini dapat terserap dalam dunia pekerjaan.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka perumusan masalah pada penelitian ini yaitu Bagaimana Implementasi Strategi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMK dalam mengurangi pengangguran melalui program pelatihan di Kota Tanjungpinang?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang dan rumuan masalah yang telah diuraikan yaitu Untuk mengetahui Implementasi Strategi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMK dalam mengurangi pengangguran melalui program pelatihan di Kota Tanjungpinang.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak

yang terkait didalam penelitian

#### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu dan menjadi sumber acuan bagi ilmu pengetahuan dalam bidang Ketenagakerjaan dan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi penelitian selanjutnya tentang Implementasi Strategi mengurangi angka pengangguran melalui program pelatihan.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi Pemerintah, diharapkan penelitian ini dapat memberi sumbangan pemikiran, saran, dan masukan kepada pemerintah khususnya dalam bidang Ketenagakerjaan.
- b. Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang perlunya untuk meningkatkan kualitas atau skill dalam diri agar memudahkan dalam mendapatkan pekerjaan.
- c. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk memperluas wawasan dan mengetahui lebih dalam teori maupun praktek dilapangan mengenai rencana Implementasi Strategi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMK Tanjungpinang dalam memberikan pelatihan dan pengembangan kualitas calon tenaga kerja